



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN

LKIP 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2022 adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini meliputi uraian Perencanaan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon selama Tahun 2022, sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Kesehatan kepada Bupati Cirebon.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam Penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2022 ini. Saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk meningkatkan kualitas LKIP di tahun yang akan datang. Semoga LKIP ini dapat berguna bagi semua pihak.

Sumber, 7 Februari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON**



dr. Hj. NENENG HASANAH, MM
NIP. 19730323 200312 2 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Setelah dilakukan pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis terhadap program dan kegiatan seperti yang diuraikan pada Bab III, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022. Dari 5 program, 22 kegiatan dan 85 Sub Kegiatan, dengan 1 tujuan, 7 sasaran dan 8 indikator diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Sebanyak 7 IK (77,78%) capaiannya sangat baik
2. Sebanyak 2 IK (22,22) capaiannya baik

Pengukuran kinerja yang tercantum dalam dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2022 yang berlandaskan pada Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2019-2024.

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Kesehatan mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp. 1.071.752.680.329,00 dengan realisasi sebesar Rp. 924.570.452.650,00 atau 84,17%. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sebesar Rp. 147.182.227.679,00. Belanja tersebut terbagi menjadi dua yaitu belanja Operasi sebesar Rp. 1.010.311.800.619,00 dengan realisasi sebesar Rp. 895.437.856.010,00 atau 88,63%, dan belanja Modal sebesar Rp. 61.440.879.710,00 dengan realisasi sebesar Rp. 29.132.596.640,00 atau 47,42% yang merupakan penunjang utama untuk pelaksanaan program. Serapan anggaran belanja ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya mencapai 84,17%.

Dengan melandainya kasus COVID-19 dan meningkatnya cakupan vaksinasi Covid serta dilonggarkannya PPKM membuat aktivitas masyarakat kembali normal, demikian juga kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat mulai diperbolehkan kembali, hal itu berdampak pada peningkatan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2022 kami buat, tentunya

laporan ini masih jauh dari kesempurnaan hal ini semata karena keterbatasan kami dalam menyusun laporan ini. Akhirnya mudah-mudahan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan pendidikan di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Ikhtisar Eksekutif	II
Daftar Isi	IV
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	2
D. Isu Strategis Yang Berpengaruh	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. Tujuan dan Sasaran	6
B. IKU Dinas Kesehatan	7
C. Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan	8
D. Kriteria Pencapaian Indikator	14
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja	16
B. Pengukuran dan Analisis Kinerja	16
C. Informasi Keuangan Terkait Pencapaian Sasaran	42
BAB IV PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dimana Dinas Kesehatan wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahunan. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsinya. Adapun sumber dana Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2022 berasal dari APBD Kabupaten Cirebon, APBD Propinsi, DAK/APBN Tahun Anggaran 2022.

Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022. Indikator kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari program atau kegiatan.

Dalam pengukuran kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2022 ini menggambarkan indikator kinerja output atau outcome pada program/kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon selama Tahun 2022 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas, merumuskan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

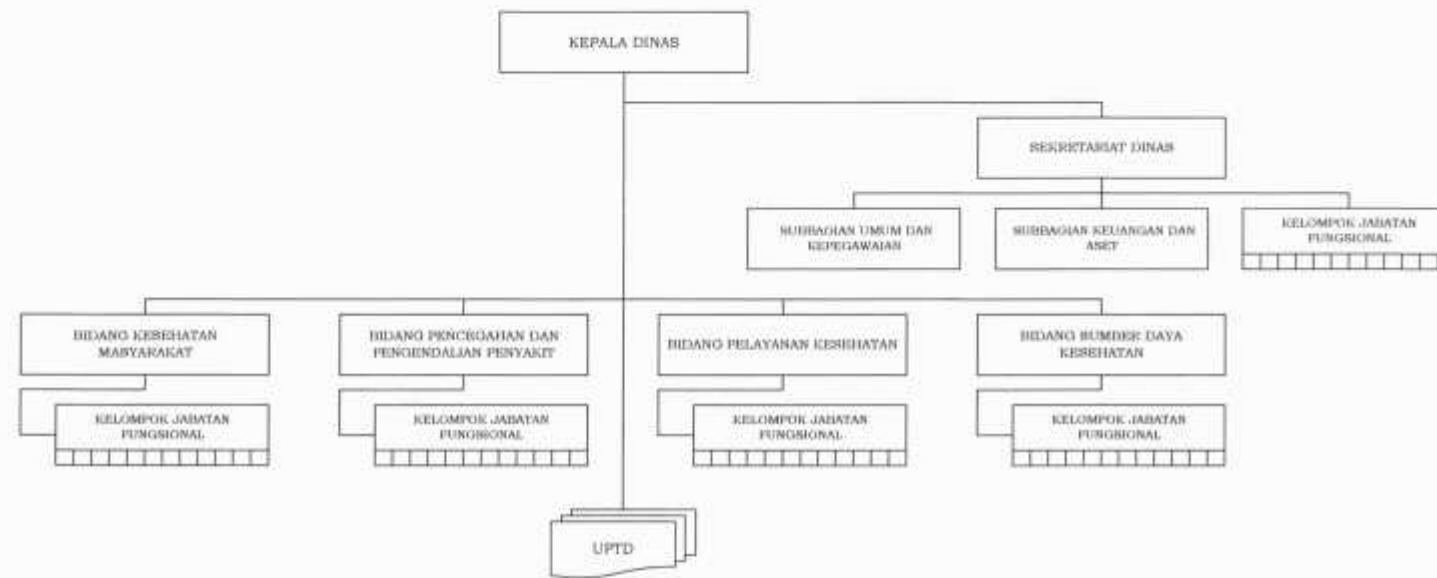
- a) Perumusan bahan perencanaan pada Dinas Kesehatan;
- b) Perumusan kebijakan bidang kesehatan;
- c) Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- d) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
- e) Pengendalian kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman;
- f) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- g) Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan;
- h) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan, dan
- i) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, BAB II Bagian Kelima Dinas Kesehatan Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 15, disebutkan bahwa Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON**

Lampiran V : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 1 Tahun 2022
 Tanggal : 3 Januari 2022
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon



Diundangkan di Sumber pada tanggal 3 Januari 2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTD

D. ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Dinas Kesehatan sebagai penyelenggara pemerintahan pada bidang kesehatan di kabupaten/kota bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengembangan sistem kesehatan di wilayahnya serta pelaksanaan program kesehatan termasuk dalam menentukan struktur organisasinya. Dengan beban tanggung jawab tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon perlu menyusun perencanaan strategis untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah :

1. Akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar di FKTP dan rujukan pada FKRTL.
2. Percepatan dan perbaikan Gizi Masyarakat.
3. Peningkatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular.
4. Penguatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui Germas.
5. Peningkatan penyehatan lingkungan dan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar.
6. Pelayanan dan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin.
7. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan (SDMK).

Untuk mengatasi isu-isu strategis tersebut perlu strategi dan kebijakan yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan. Seperti yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2019-2024 untuk urusan wajib bidang kesehatan menitikberatkan kepada peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, dengan arah kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terutama bagi keluarga tidak mampu, perbaikan tata kelola penyelenggaraan kesehatan, peningkatan dan pemerataan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 1. PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Isu Strategis Yang Mempengaruhi
- E. Sistematika Penulisan

BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Tujuan dan Sasaran
- B. IKU Dinas Kesehatan
- C. Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan
- D. Kriteria Pencapaian Indikator

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
- B. Pengukuran dan Analisis Kinerja
- C. Informasi Keuangan Terkait Pencapaian Sasaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon pada Tahun 2019-2024 yaitu : **Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**, dengan **Indeks Keluarga Sehat (IKS)** sebagai indikatornya, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan menegakkan 3 (tiga) pilar utama, yaitu : 1) penerapan paradigma sehat, 2) penguatan pelayanan kesehatan, dan 3) pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penerapan paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan upaya promotif dan preventif, serta pemberdayaan masyarakat.

Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu menggunakan pendekatan *continuum of care (CoC)* dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Pelaksanaan JKN dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan manfaat (*benefit*), serta kendali mutu dan biaya. Kesemuanya itu ditujukan kepada tercapainya keluarga-keluarga sehat.

Target pencapaian indikator IKS di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022 adalah : 0,30 atau 30% dan meningkat menjadi 0,40 atau 40% pada Tahun 2024.

Sasaran

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar-upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya.

Dinas Kesehatan memiliki 7 (tujuh) sasaran dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Cirebon pada periode Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Sasaran 1.

Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI), dengan indikator sasaran :
Angka Kematian Ibu dari 82,0 per 100.000 KH pada Tahun 2022 menjadi 79,0 per 100.000 KH pada Tahun 2024.

Sasaran 2.

Tercapainya *Universal Health Coverage (UHC)*, dengan indikator sasaran :
Persentase UHC dari 98,0 pada Tahun 2022 menjadi 99,0 pada Tahun 2024.

Sasaran 3.

Meningkatnya PHBS Rumah Tangga, dengan indikator sasaran:
Persentase Rumah Tangga berPHBS dari 71,0 pada Tahun 2022 menjadi 75,0 pada Tahun 2024.

Sasaran 4.

Meningkatnya Tempat Pengelolaan Pangan yang memenuhi syarat kesehatan, dengan indikator sasaran :
Persentase Tempat Pengelolaan Pangan memenuhi syarat kesehatan dari 64,0% pada Tahun 2022 menjadi 70,0% pada Tahun 2024.

Sasaran 5.

Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan, dengan indikator sasaran :
Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar dari 16,70% pada Tahun 2022 menjadi 26,70% pada Tahun 2024.

Sasaran 6. Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas manajemen pelayanan kesehatan, dengan indikator sasaran :

Indeks Kepuasan Masyarakat dari 3,39 pada Tahun 2022 menjadi 3,53 pada Tahun 2024.

Sasaran 7.

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan, dengan indikator sasaran :
Persentase capaian standar pelayanan minimal Rumah sakit di RSUD Arjawinangun dan RS. Waled mencapai 88,00% pada tahun 2022 menjadi 100% pada tahun 2024.

B. IKU DINAS KESEHATAN

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Cirebon ditujukan untuk meningkatkan pencapaian sasaran dalam indikator kesehatan, indikator kinerja kunci, standar pelayanan minimal, indikator RPJMD dan indikator lainnya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Berikut Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.1

**Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS)		Indeks Keluarga Sehat (IKS)
	1. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu
	2. Tercapainya <i>Universal Health Coverage (UHC)</i>	Persentase UHC
	3. Meningkatnya PHBS Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga berPHBS
	4. Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas manajemen pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat
	5. Meningkatnya Tempat Pengelolaan Pangan yang memenuhi syarat kesehatan	Persentase tempat pengelolaan pangan yang memenuhi syarat kesehatan
	6. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar
	7. Meningkatnya mutu pelayanan (RS)	Persentase capaian standar pelayanan minimal di RSUD Arjawinangun
		Persentase capaian standar pelayanan minimal di RSUD Waled

C. PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini

merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2022.

Berikut ringkasan perjanjian kinerja Tahun 2022 beserta lampirannya.

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	5	6
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	persen	30,0
1	Menurunnya Angka kematian ibu	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	82,0
2	Tercapainya <i>Universal Health</i>	Persentase UHC	persen	98,0
3	Meningkatnya PHBS Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga berPHBS	persen	71,0
4	Meningkatnya kinerja Kinerja aparatur dankualitas manajemen pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat	poin	3,39
5	Meningkatnya Tempat Pengelolaan Pangan yang memenuhi syarat kesehatan	Persentase tempat pengelolaan pangan yang memenuhi syarat kesehatan	persen	64,0
6	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	persen	16,70
7	Meningkatnya mutu pelayanan Kesehatan	Persentase capaian standar pelayanan minimal di RSUD Arjawinangun	persen	88,0
		Persentase capaian standar pelayanan minimal di RSUD Waled	persen	88,0

Sesuai dengan DPA perubahan Tahun 2022, dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2022, tercantum dalam belanja urusan (belanja program/kegiatan/sub kegiatan) dengan jumlah sebesar Rp. 331,679,408,593,00. Berikut rincian belanja setiap program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2022.

Tabel 2.3

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Urusan Kesehatan	331,679,408,593
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	330,836,557,993
2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	24,843,009,427
05	Pengembangan RS Arjawinangun	484,000,000
09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2,279,409,000
13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2,385,876,000
14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan a. Dinas Kesehatan	863,799,002
16	Pengadaan Obat, Vaksin	6,974,482,863
17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	11,795,442,562
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan a. Dinas Kesehatan	60,000,000
2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	305,758,668,466
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	356,752,900
02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	80,754,200
03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	94,441,500
04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	71,775,000
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	230,943,000
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	237,104,400
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	77,758,000
08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	106,704,704
09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	52,820,600
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	153,656,400
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	148,448,000
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	2,008,900,400

14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	1,520,500,000
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6,032,952,000
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	109,328,800
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2,676,558,800
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	220,916,600
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	22,500,000
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	674,074,900
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	46,803,600
23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	323,678,600
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1,054,264,752
26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	188,602,415,410
29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	75,000,000
32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD Waled dan RSUD Arjawinangun	2,707,999,400
33	Operasional Pelayanan Puskesmas (retri/BOK)	51,271,156,050
34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Labkesda)	3,758,908,450
35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	143,199,800
37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	42,178,261,200
38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat darurat Terpadu (SPGDT)	720,091,000
2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	190,918,900
01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	59,999,900
02	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	100,000,000
03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	30,919,000
2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah kabupaen/Kota	43,961,200
03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	34,961,200
04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	9,000,000
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	199,999,300

2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	79,999,800
01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	44,999,900
02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	34,999,900
2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	79,999,700
01	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	44,999,900
03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	34,999,800
2.03	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39,999,800
01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39,999,800
04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	79,999,900
2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	49,999,900
01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	49,999,900
2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	15,000,000
01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	15,000,000
2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	15,000,000
01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM)	15,000,000
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	562,851,400
2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	297,851,400

01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	297,851,400
2.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	215,000,000
01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	215,000,000
2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000
01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	50,000,000

D. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing- masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran INDIKATOR POSITIF (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran INDIKATOR NEGATIF (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\%$$

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

Kriteria	Capaian target indikator
Sangat baik	$\geq 100\%$
Baik	80% - < 100%
Cukup baik	60% - 80%
Kurang Baik	50% - 60%
Tidak Baik	< 50%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

A. KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon telah melaksanakan fungsinya sebagai unsur pelayanan terhadap masyarakat dengan baik dan proporsional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam rantai kerja yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah. Indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adalah adanya suatu tingkat kepuasan baik pada masyarakat maupun pemerintah. Pada tahun 2022 telah dilakukan survei kepuasan terhadap semua pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di semua UPTD Puskesmas se Kabupaten Cirebon, dengan nilai 3,30. Itu merupakan kriteria nilai yang baik atas pencapaian seberapa jauh kepuasan yang diterima oleh masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh UPTD Puskesmas.

B. PENGUKURAN DAN ANALISIS KINERJA

Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Kesehatan untuk Tahun 2022 merupakan tahun pertama pada Renstra Periode 2019-2024 belum seluruhnya dapat dilaksanakan, oleh karena itu persentase tingkat pencapaiannya belum maksimal. Ikhtisar pencapaian sasaran Tahun 2022 dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target	Capaian	Persentase capaian thd target kinerja	Kriteria
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	30,00	30,16	100,54	sangat baik
	1. Menurunnya Angka kematian ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	82,00	67,03	183,16	sangat baik
	2. Tercapainya <i>Universal Health Coverage (UHC)</i>	Persentase UHC	98,00	95,99	97,95	baik

	3. Meningkatnya PHBS Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga berPHBS	71,00	71,07	100,11	sangat baik
	4. Meningkatnya Tempat Pengelolaan Pangan yang memenuhi syarat kesehatan	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan memenuhi syarat kesehatan	64,00	85,99	134,35	sangat baik
	5. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	16,70	58,33	349,30	sangat baik
	6. Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas manajemen dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,39	98,23	98,23	baik
	7. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Persentase capaian standar pelayanan minimal RS di RSUD Arjawinangun	88,00	105,97	105,97	sangat baik
		Persentase capaian standar pelayanan minimal RS di RSUD Waled	88,00	101,41	101,41	sangat baik

Pada Tahun 2022 pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran dengan menggunakan 9 indikator kinerja (IK) yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022, dengan hasil sebagai berikut :

1. Sebanyak 7 IK (77,78,%) capaiannya sangat baik
2. Sebanyak 2 IK (22,22%) capaiannya baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2022, maka evaluasi dan analisis masing-masing sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pencapaian Tujuan Dinas Kesehatan :**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS)**

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Capaian 2021	2022					Target Akhir Renstra
	Uraian	Indikator Kinerja Outcome			Target	Sasaran	Hasil	Capaian	Persentase Capaian	
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Persen	22,00	30,00	576.648	173.922	30,16	100,54	40,00

Pada Tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator tujuan Dinas Kesehatan yaitu Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah sebesar 30%. Capaian IKS pada Tahun 2022 sebesar 30,16%, dengan rincian jumlah keluarga sehat yang diperoleh sebanyak 173.922 keluarga, dari total keluarga yang didata sebanyak 576.648 keluarga. Dengan demikian rasio persentase capaian terhadap target indikator tujuan tersebut sebesar 100,54 dengan kategori sangat baik.

Apabila kita membandingkan capaian IKS pada Tahun 2022 sebesar 30,16% terhadap Tahun 2021 (22,00), maka ada peningkatan capaian IKS sebesar 8,16%, dan dari nilai persentase capaian antara Tahun 2022 (100,54%) dengan Tahun 2021 (88,00%) mengalami peningkatan sebesar 12,54%. Saat ini Puskesmas sudah sampai pada tahap intervensi lanjutan, meskipun masih ada beberapa Puskesmas yang masih melaksanakan input data keluarga.

Target capaian IKS pada Tahun 2022 sebesar 30% telah disinkronkan dengan target Renstra Perubahan Dinas Kesehatan pada tahun terakhir Renstra Perubahan sebesar 40%. Capaian IKS tahun 2022 sebesar 30,16% masih di bawah target akhir Renstra.

Pencapaian Sasaran 1 : Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Capaian 2021	2022					Target Akhir Renstra
	Uraian	Indikator Kinerja Outcome			Target	Sasaran	Hasil	Capaian	Persentase Capaian	
1	Menurunnya Angka kematian ibu	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	112.21/100.000 KH	82,00	43264	29	67,03	183,16	79

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah 82 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH). Capaian angka kematian ibu pada tahun 2022 sebesar 67,03 per 100.000 KH, dengan rincian jumlah kematian ibu yang ditemukan sebanyak 26 kasus, dari total kelahiran hidup sebanyak 43.264 bayi. Pada tahun 2022 ini terjadi penurunan angka kematian ibu. Untuk indikator ini yang diharapkan adalah adanya penurunan angka pencapaiannya, semakin menurun semakin baik, sehingga rasio persentase capaian indikator sasaran tersebut sebesar 183,16% dengan kategori sangat baik.

Apabila kita membandingkan capaian kematian ibu pada tahun 2022 sebesar 67,03 per 100.000 KH terhadap tahun 2021 sebesar 112,21 per 100.000 KH), maka ada penurunan yang sangat signifikan sebesar 45,18 poin. Dilihat dari jumlah kematian ibu juga ada penurunan dari 52 kematian pada tahun 2021 menjadi 26 kematian pada tahun 2022.

Capaian angka kematian ibu pada tahun 2022 sudah dibawah target yang ditetapkan sebesar 82/100.000 KH. Target tersebut sudah disinkronkan dengan target akhir Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024 sebesar 79/100.000 KH, capaian angka kematian ibu tahun 2022 sudah dibawah target akhir tahun Renstra.

Kematian Ibu masih menjadi prioritas yang harus di selesaikan di tahun 2022, Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan diantaranya :

1. Peningkatan edukasi pada Bumil dan keluarganya tentang resiko kehamilan;
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam melakukan pelayanan KIA;
3. Penguatan sistem rujukan serta pencatatan dan pelaporan yang optimal melalui koordinasi dengan layanan swasta/BPM;
4. Meningkatkan koordinasi lintas program maupun lintas sektoral agar diperoleh kesesuaian data mengenai kematian Ibu antar program (Puskesmas dan Dinas Kesehatan);

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan KIA yang ada di Puskesmas beserta jejaring pelayanannya.
6. Meningkatkan cakupan vaksinasi covid dan penanganan kasus dengan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*), sehingga Covid-19 terus melandai dan kematian ibu dapat terus dikendalikan.

Setelah peralihan dari masa pandemi pada tahun 2021, pada tahun 2022 perlahan Kegiatan Pelayanan Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dapat berjalan dengan baik, dan itu berpengaruh pada peningkatan di beberapa indikator capaian kinerjanya. Sehingga berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan bayi pada tahun 2022.

Adapun Program yang mendukung capaian sasaran 1 adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang memiliki 33 Sub Kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 356.752.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 355.108.610,- sisa sebesar Rp. 1.644.290,- atau tercapai sebesar 99,54%. Dengan output sub kegiatan ini sebanyak 46.326 Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4) dari target 50.633 bumil.
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 80.754.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 77.696.200,- sisa sebesar Rp. 3.058.000,- atau tercapai sebesar 96,21%. Dengan output sub kegiatan ini ibu bersalin mendapatkan pelayanan ibu bersalin sesuai standar (PF) sebanyak 43.515 ibu dari target 48.147 ibu bersalin
3. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (BBL), dengan alokasi anggaran sebesar Rp 94.441.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 94.441.500,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%. Dengan output sub kegiatan ini sebanyak 43.077 bayi mendapatkan pelayanan BBL sesuai standar (KN Lengkap) dari target 47.775 bayi
4. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 71.775.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 70.875.000,- sisa sebesar Rp 900.000,- atau tercapai sebesar 98,75%. Dengan output sub kegiatan ini jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita (0-59 bln) sesuai standar sebanyak 145.546 balita dari target sebanyak 174.270 balita.

5. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 230.943.000,- dan terealisasi sebesar Rp 230.648.710,- sisa sebesar Rp. 294.290,- atau tercapai sebesar 99,87%. Dengan output sub kegiatan anak usia pendidikan dasar (kelas 1 s/d 9) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 322.604 anak dari target 331.645 anak usia pendidikan dasar.
6. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 237.104.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 237.104.400,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100,00% Dengan output sub kegiatan ini penduduk usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar sebanyak 1.215.635 orang dari target sebanyak 1.688.136 orang.
7. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 77.758.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 77.758.000,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100,00%. Dengan output sub kegiatan ini penduduk usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebanyak 161.288 lansia dari target 188.101 lansia.
8. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 106.704.704,- dan terealisasi sebesar Rp. 99.310.464,- sisa sebesar Rp. 7.394.240,- atau tercapai sebesar 93,07%. Dengan output sub kegiatan ini penduduk usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan Hipertensi sesuai standar sebanyak 417.576 orang dari target 712.833 orang.
9. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 52.820.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 52.820.600,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100,00%. Dengan output sub kegiatan ini penduduk usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan Penyakit DM sesuai standar sebanyak 18.853 orang dari target sebanyak 24.712 orang.
10. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 153.656.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 150.366.400,- sisa sebesar Rp. 3.290.000,- atau tercapai sebesar 97,86%. Dengan output sub kegiatan ini jumlah penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 2.096 orang dari target 3.537 orang.

11. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 148.448.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 141.277.000,- sisa sebesar Rp. 7.171.000,- atau tercapai sebesar 95,17%. Dengan output sub kegiatan ini orang terduga TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai standar sebanyak 28.867 orang dari target 31.985 orang, penemuan dan penanganan penyakit TBC BTA sebanyak 3.016 orang dari target 3.495 orang, dan sebanyak 3.044 penderita TB yang dinyatakan pengobatan lengkap dan sembuh dari target 5.056 orang.
12. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.008.900.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.970.065.788,- sisa sebesar Rp. 38.834.612,- atau tercapai sebesar 98,07%. Dengan output sub kegiatan ini Skrining HIV/AIDS pada populasi kunci dan populasi sebanyak 56.403 orang dari target 524 orang, Jumlah HIV mendapatkan perawatan dan pengobatan HRV sesuai standar sebanyak 505 orang dari target 299 kasus, sebanyak 73 fasilitas kesehatan yang dilakukan setup layanan HIV/AIDS dari target 58 fasilitas.
13. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.520.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.519.440.000,- sisa sebesar Rp. 1.060.000,- atau tercapai sebesar 99,93%. Dengan output sub kegiatan ini terbentuknya pos kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada situasi khusus sebanyak 40 Pos, (pos bencana, pos lebaran dan pos natal & tahun baru) dari target 40 Pos.
14. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.032.952.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.448.646.550,- sisa sebesar Rp. 584.305.450,- atau tercapai sebesar 90,31%. Dengan output sub kegiatan ini ditemukan balita Berat Badan Kurang sebanyak 17.078 balita dari target 18.687 balita, dan Balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebanyak 410 balita dari target 184 balita.
15. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 109.328.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 109.328.800,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%. Dengan output sub kegiatan ini sebanyak 10 Pos Upaya Kesehatan Kerja yang terbentuk dari target 5 Pos, sebanyak 3.129 siswa SD kelas IV dan V

mengikuti tes kebugaran dari target 7.882 anak dan sebanyak 618 jemaah haji diperiksa kebugarannya dari target 2.051 jemaah.

16. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.676.558.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.607.574.800,- sisa sebesar Rp. 68.984.000,- atau tercapai sebesar 97,42%. Dengan output sub kegiatan ini sebanyak 1.332.435 sarana Sarana Air Bersih dari target 528.625 sarana yang memenuhi syarat, jamban sehat sebanyak 273.140 sarana dari target 305.455 sarana.
17. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 220.916.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 219.046.600,- sisa sebesar Rp. 1.870.000,- atau tercapai sebesar 99,15%. Dengan output sub kegiatan ini frekuensi penyuluhan luar gedung oleh Dinas Kesehatan sebanyak 31 kali dalam satu tahun dari target 31 kali.
18. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.500.000,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%. Dengan output sub kegiatan ini sebanyak 44 Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan tradisional sesuai target.
19. Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 674.074.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 638.625.500,- sisa sebesar Rp. 35.449.400,- atau tercapai sebesar 94,74%. Dengan output sub kegiatan ini terlaksananya Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD KLB) penyakit potensial wabah untuk 1.092 calon jemaah haji dari target 2.375 jemaah, sebanyak 408 desa/kelurahan dengan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) mencapai 80% dari target 310 desa, jumlah murid Sekolah Dasar yang diimunisasi Measles Rubella (MR) sebanyak 41.912 anak dari target 33.000 anak.
20. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 46.803.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.803.600,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100,00%. Dengan output sub kegiatan ini sebanyak 4 sekolah yang dilakukan skrining Kesehatan jiwa sudah sesuai target.
21. Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 323.678.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 323.212.600,- sisa sebesar Rp. 466.000,- atau tercapai sebesar 99,86%. Dengan output sub kegiatan ini sebanyak 193.742 KK diintervensi PIS-PK dari target 193.738 KK, jumlah KK mandiri sebanyak 6.715 KK dari target

- 6.700 KK, kunjungan rawat jalan gigi sebanyak 93.228 kunjungan dari target 93.125 kunjungan, sebanyak 425 mata yang dioperasi katarak sudah sesuai target, kunjungan laboratorium Puskesmas sebanyak 225.464 kunjungan dari target 255.110 kunjungan.
22. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.054.264.752,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.039.630.102,- sisa sebesar Rp. 14.634.650,- atau tercapai sebesar 97,07%. Dengan output sub kegiatan ini penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebanyak 1.539 orang dari target 1.130 orang, penderita diare yang ditangani sebanyak 31.989 orang dari target 62.019 orang, terlaksananya fogging fokus sebanyak 228 fokus dari target 130 fokus, balita pneumonia yang ditangani sebanyak 6.817 kasus dari target 10.692 kasus, dan penemuan kasus kusta sebanyak 148 kasus/10.000 penduduk dari target 208 kasus.
23. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 51.271.156.050,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.194.116.200,- sisa sebesar Rp. 12.077.039.850,- atau tercapai sebesar 76,44%. Dengan output sub kegiatan ini Puskesmas yang memanfaatkan dana BOK Puskesmas sebanyak 60 Puskesmas.
24. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.758.908.450,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.224.826.069,- sisa sebesar Rp. 534.082.381,- atau tercapai sebesar 85,79%. Dengan output sub kegiatan ini sebanyak 7.342 orang yang melakukan kunjungan labkesda dari target 5.500 kunjungan.
25. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.5000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 73.362.000,- sisa sebesar Rp. 1.638.000,- atau tercapai sebesar 97,82%. Dengan output sub kegiatan ini jumlah kecamatan menyelenggarakan kecamatan sehat sebanyak 31 kecamatan dari target 31 kecamatan.
26. Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 143.199.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 142.077.369,- sisa sebesar Rp. 1.122.431,- atau tercapai sebesar 99,22 Dengan output sub kegiatan ini sebanyak 60 Puskesmas sudah terakreditasi semua, 5 RS terakreditasi dari target 11 RS, Klinik Pratama terakreditasi sebanyak 1 klinik dari target 10 klinik, dan ada 1 (satu) laboratorium yang terakreditasi (laboratorium kesehatan daerah).

27. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42.178.261.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.812.602.807,- sisa sebesar Rp. 11.365.658.393,- atau tercapai sebesar 73,05%. Dengan output sub kegiatan ini seluruh kejadian KLB penanganan KLB yang ditangani (1x24 Jam) 4 KLB dari target 12 KLB, kelengkapan dan Ketepatan laporan W2 (EWARS) sebanyak 3.120 laporan, ketepatan dan kelengkapan laporan STP sebanyak 720 dari target 720 laporan.
28. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat darurat Terpadu (SPGDT), dengan alokasi anggaran sebesar Rp 720.091.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 712.141.016,- sisa sebesar Rp. 7.949.984,- atau tercapai sebesar 98,90%. Dengan output sub kegiatan ini kasus gawat darurat yang dilayani PSC 119 sebanyak 4.308 kasus dari target 6.500 kasus.
29. Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 59.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 58.642.600,- sisa sebesar Rp. 1.357.300,- atau tercapai sebesar 97,74%. Dengan output sub kegiatan ini ada 3 dokumen data & Informasi Kesehatan (Profil kesehatan, Laporan Komdat online, Laporan SIP/SP3).
30. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 99.500.000,- sisa sebesar Rp. 500.000,- atau tercapai sebesar 99,50%. Dengan output sub kegiatan ini Puskesmas yang menggunakan Aplikasi SIKDA sebanyak 57 Puskesmas dari target 60 Puskesmas.
31. Sub Kegiatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.919.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.413.363,- sisa sebesar Rp. 2.505.637,- atau tercapai sebesar 91,90%. Dengan output sub kegiatan ini tersedianya Perangkat SIK dan Jaringan Internet sebanyak 9 unit dari target 15 unit.
32. Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 34.961.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.961.200,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100,00%. Dengan output sub kegiatan ini Puskesmas terverifikasi Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sebanyak 60 Puskesmas.
33. Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.900.000,- sisa sebesar Rp. 100.000,- atau tercapai sebesar 98,89%. Dengan output sub kegiatan ini Perjanjian Kerjasama Pelayanan

Rujukan antara Dinas Kesehatan dengan RS di Kabupaten Cirebon sebanyak 12 rumah sakit dari target 12 rumah sakit.

Pencapaian Sasaran 2 : Tercapainya Universal Health Coverage (UHC)

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Capaian 2021	2022					Target Akhir Renstra
	Uraian	Indikator Kinerja Outcome			Target	Sasaran	Hasil	Capaian	Persentase Capaian	
1	Tercapainya Universal Health Coverage (UHC)	Persentase UHC	Persen	91.66	98,0	2.380.074	2.284.608	95,99	97,95	99.00

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 98,00%. Capaian UHC pada tahun 2022 sebesar 95,99%, dengan rincian jumlah penduduk yang terdaftar peserta BPJS sebanyak 2.284.608 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 2.380.074 jiwa. Dengan demikian rasio persentase capaian terhadap target indikator sasaran tersebut sebesar 97,95% dengan kategori baik.

Apabila kita membandingkan Capaian UHC pada tahun 2021 sebesar 91,66%, terhadap tahun 2022 (95,99%), maka ada peningkatan capaian sebesar 4,33%. Hasil capaian UHC tahun 2022 masih dibawah target yang diharapkan disebabkan karena diterbitkannya Keputusan Menteri Sosial Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2021 sehingga berdampak kepada Kepesertaan JKN KIS Kabupaten Cirebon sebanyak 139.475 jiwa yang dinon-aktifkan karena meninggal, peserta pindah segmen, kepesertaan ganda dan masalah pada NIK.

Target UHC pada tahun 2022 sebesar 98% telah disinkronkan dengan target akhir Renstra Perubahan Dinas Kesehatan pada periode Tahun 2019-2024 sebesar 99,00%. Bila melihat hasil capaian UHC pada tahun 2022 maka capaian tersebut masih dibawah dari target akhir tahun Renstra.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mempercepat kepesertaan semesta atau UHC dengan dasar Addendum Perjanjian Kerja Sama yang sudah ditandatangani, Dinas Kesehatan, BPJS dan SKPD terkait melaksanakan rekonsiliasi dan menyusun rencana yang akan dilaksanakan sesuai peran Perangkat Daerah masing-masing. Tujuannya adalah menambah sasaran kepesertaan BPJS terutama BPJS-PBI Kelas 3 untuk masyarakat yang berhak dan membutuhkan. Kegiatan ini cukup terbukti dengan adanya peningkatan jumlah kepesertaan BPJS. Adapun hambatannya adalah jumlah penduduk yang berubah-ubah dalam periode yang pendek, untuk mengatasi

hal tersebut, Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam penetapan jumlah penduduk.

Adapun Program yang mendukung capaian sasaran 1 adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 188.602.415.410,- dan terealisasi sebesar Rp. 187.815.245.530,- sisa sebesar Rp. 787.169.880- atau tercapai sebesar 98,48%. Dengan output sub kegiatan ini jumlah penduduk miskin yang dicover sebagai peserta PBI daerah sebanyak 362.601 orang dari target 339.643 jiwa.

Pencapaian Sasaran 3 : Meningkatkan PHBS Rumah Tangga

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Capaian 2021	2022					Target Akhir Renstra
	Uraian	Indikator Kinerja Outcome			Target	Sasaran	Hasil	Capaian	Persentase capaian	
1	Meningkatnya PHBS Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	%	71,00	71,00	145.167	103.177	71,07	100,11	75

Pada Tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 71,00%. Capaian rumah tangga ber PHBS pada Tahun 2022 sebesar 71,07%, dengan rincian jumlah rumah tangga (RT) yang ber PHBS sebanyak 103.177 RT, dari total RT yang didata/dipantau sebanyak 145.167 RT. Dengan demikian rasio persentase capaian terhadap target indikator sasaran tersebut sebesar 101,03% dengan kategori sangat baik.

Apabila kita membandingkan capaian rumah tangga ber PHBS pada tahun 2022 sebesar 71,07% terhadap tahun 2021 (69,71%), maka ada peningkatan persentase sebesar 1,36%. Jika membandingkan rasio persentase capaian antara tahun 2021 (100,11%) dengan tahun 2022 (101,03%) mengalami peningkatan sebesar 0,92%.

Target persentase rumah tangga ber PHBS pada Tahun 2022 sebesar 71,0% telah disinkronkan dengan target akhir Renstra Perubahan Dinas Kesehatan pada periode Tahun 2019-2024 sebesar 75%. Bila dilihat dari hasil capaian persentase rumah tangga ber PHBS pada Tahun 2022 maka capaian tersebut belum mencapai target akhir tahun Renstra.

Perilaku hidup bersih dan sehat tatanan rumah tangga adalah upaya untuk menyadarkan keluarga dan semua anggota keluarga agar memiliki

pengetahuan, kemauan dan kemampuan dalam mempraktikkan PHBS di tatanan rumah tangga. Sehingga keluarga dan seluruh anggota keluarga dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mampu mencegah resiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit, mampu melakukan perilaku untuk mengatasi masalah yang dihadapi secara mandiri serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Adapun indikator PHBS tatanan rumah tangga: 1) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 2) Memberi bayi ASI Eksklusif 3) Menimbang bayi dan balita setiap bulan 4) Menggunakan air bersih 5) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun 6) Menggunakan jamban sehat 7) Memberantas jentik di rumah sekali seminggu 8) Makan buah dan sayur setiap hari 26 Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon 9) Melakukan Aktivitas Fisik setiap hari 10) Tidak merokok di dalam rumah.

Meskipun telah mencapai target, pelaksanaan PHBS rumah tangga pada tahun 2022, namun masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya :

1. Dari 60 Puskesmas, masih ada 29 Puskesmas yang belum mencapai target, diantaranya ada 6 Puskesmas yang capaian PHBS rumah tangganya masih dibawah 50%;
2. Indikator ASI Eksklusif dan tidak merokok di dalam rumah perlu menjadi perhatian yang serius agar dapat ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya;
3. Rumah tangga yang didata masih rendah, pada tahun 2022 baru 50% rumah tangga yang didata dan dilakukan pembinaan PHBS, sehingga angka tersebut belum dapat menggambarkan perilaku masyarakat Kabupaten Cirebon dalam ber PHBS.

Adapun Program yang mendukung capaian sasaran 3 adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yang memiliki 3 Sub Kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 297.851.400,- dan terealisasi sebesar Rp 296.731.400,- sisa sebesar Rp 1.120.000,- atau tercapai sebesar 99,62%. Dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah Desa siaga aktif strata madya sebanyak 377 desa/kelurahan dari target 336 desa/kelurahan.

2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 215.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 211.936.710,- sisa sebesar Rp. 3.063.290,- atau tercapai sebesar 98,58%. Dengan output sub kegiatan ini sebanyak 1.334 dari target 2.104 tatanan lainnya yang melaksanakan PHBS (fasilitas pelayanan kesehatan, tempat tempat umum (TTU) dan tempat kerja) dan sebanyak 16.341 dari target 14.790 penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV AIDS.
3. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 48.000.000,- sisa sebesar Rp. 200.000,- atau tercapai sebesar 99,60%. Dengan output sub kegiatan ini adalah strata Posyandu Aktif sebanyak 1.791 posyandu dari target 1.690 posyandu.

Pencapaian Sasaran 4 : Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas manajemen pelayanan

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Capaian 2021	2022					Target Akhir Renstra
	Uraian	Indikator Kinerja Outcome			Target	Sasaran	Hasil	Capaian	Persentase Capaian	
1	Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas manajemen pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	3,245	3,39	3,39	3,33	98,23	98,23	3,53

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 3,39. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 sebesar 3,33. Dengan demikian rasio persentase capaian dibandingkan target indikator sasaran tersebut sebesar 98,23% dengan kategori baik.

Apabila kita membandingkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 sebesar 3,33 terhadap tahun 2021 (3,25), maka ada peningkatan capaian sebesar 0,08 poin. Jika membandingkan rasio persentase capaian terhadap target antara tahun 2022 (98,23%) dengan tahun 2021 (97,89%) juga mengalami peningkatan sebesar 0,34 poin.

Target Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 sebesar 3,39 telah disinkronkan dengan target akhir Renstra Perubahan Dinas Kesehatan pada periode Tahun 2019-2024 sebesar 3.53. Bila dilihat dari hasil capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 maka capaian tersebut masih dibawah target akhir tahun Renstra.

Hasil dari survei kepuasan masyarakat pada tahun 2022 secara umum kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dipersepsikan BAIK oleh masyarakat penggunaannya. Hal ini terlihat dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh berkisar diantara 76,61 – 88,30, nilai SKM yang diperoleh dari 9 unsur pelayanan adalah 83,15 (Kategori BAIK). Dari hasil survei 14 Puskesmas dengan kinerja kategori sangat baik, 44 Puskesmas Kategori Baik dan 2 Puskesmas kategori Kurang Baik. Pelayanan di lingkungan Dinas Kesehatan kategori Baik. Masih diperlukan kegiatan survei kepuasan masyarakat secara periodik sebagai upaya untuk mengevaluasi kualitas pelayanan di Puskesmas dan layanan publik di Dinas Kesehatan. Upaya evaluasi terhadap pelayanan publik ini diharapkan dapat terlaksana secara berkala sekurangnya sekali dalam satu tahun agar pihak Puskesmas dan seluruh unit pelayanan di Dinas Kesehatan dan Labkesda dapat secara optimal melakukan perbaikan ataupun peningkatan pelayanan.

Adapun Program yang mendukung capaian sasaran 4 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang memiliki 30 Sub Kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 75.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 73.912.900,-sisa sebesar Rp. 1.087.100,- atau tercapai sebesar 98,55%. Output sub kegiatan ini tersedianya dokumen Renja murni 2023 dan Renja Perubahan Tahun 2022.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.339.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.200.000,- sisa sebesar Rp. 139.000,- atau tercapai sebesar 99,45%. Output sub kegiatan ini tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD : sebanyak 4 dokumen yaitu dokumen LPPD/LKPJ 2021, dokumen LAKIP 2021, Laporan Evaluasi Kinerja terhadap Renstra/Renja 2021 dan Laporan Pencapaian SPM 2021).
3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.661.100, dan terealisasi sebesar Rp. 19.442.500, sisa sebesar Rp. 218.600,- atau tercapai sebesar 98,89%. Output sub kegiatan ini adanya dokumen laporan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 233.887.140.775 dan terealisasi sebesar Rp. 226.438.450.232 sisa sebesar Rp. 7.448.690.543 atau tercapai sebesar 96,82%. Output sub kegiatan ini sebanyak 1.499 pegawai ASN baik Dinas Kesehatan dan Rumah sakit telah terbayar gaji dan tunjangannya setiap bulan.
5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp 142.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 142.266.704 sisa sebesar Rp.233.296 atau tercapai sebesar 99,84%. Output sub kegiatan ini tersedianya dokumen rekonsiliasi pendapatan dan belanja, dan penatausahaan akuntansi sebanyak 36 dokumen dari target 36 dokumen.
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebesar Rp 25.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 24.995.500 sisa sebesar Rp. 4.500 atau tercapai sebesar 99,98%. Output sub kegiatan ini tersedianya 1 (satu) dokumen laporan keuangan akhir tahun.
7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebesar Rp 15.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 15.000.000 sisa sebesar Rp. 0 atau tercapai sebesar 100%. Output sub kegiatan ini tersedianya dokumen 1 (satu) laporan keuangan semesteran yang dibuat.
8. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD sebesar Rp. 311.140.000 dan terealisasi Rp. 218.297.784 sisa sebesar Rp. 92.842.216 atau tercapai sebesar 70,16%. Output sub kegiatan ini adanya penyelesaian /penuntutan penggantian kepada pihak yang menyebabkan kerugian daerah dilingkup Dinas Kesehatan sebanyak 62 (Dinkes, UPT Labkesda dan 60 UPTD Puskesmas).
9. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar Rp 55.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 54.939.256,- sisa sebesar Rp.60.744,- atau tercapai sebesar 99,89%. Output sub kegiatan ini terlaksananya Bimbingan teknis pengelolaan BMD di lingkup Dinas Kesehatan (Dinkes, UPT Labkesda dan 60 UPTD Puskesmas), jumlah kendaraan dinas yang diasuransikan sebanyak 6 unit dan 2 Gedung yang diasuransikan.
10. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar Rp 37.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 37.500.000,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100,00%. Output sub kegiatan ini Dokumen laporan barang milik daerah bulanan,

tahunan dan semesteran yang diselesaikan oleh Dinas Kesehatan sebanyak 36 Dokumen.

11. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar Rp 29.973.700,- dan terealisasi sebesar Rp.29.964.772,- sisa sebesar Rp.8.928- atau tercapai sebesar 99,97%. Output sub kegiatan ini sebanyak 62 unit kerja melakukan penatausahaan BMD sesuai aturan.
12. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebesar Rp 29.999.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.992.256,- sisa sebesar Rp. 76.744,- atau tercapai sebesar 99,98%. Output sub kegiatan ini tersedianya data kepegawaian sebanyak 3 dari target 3 dokumen
13. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian sebesar Rp 26.371.500 dan terealisasi sebesar Rp. 26.371.500 sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100,00%. Output sub kegiatan ini tersedianya sistem informasi kepegawaian yang akurat sebanyak 7 dari target 7 dokumen.
14. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai pada SKPD sebesar Rp 59.630.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 59.612.144,- sisa sebesar Rp. 17.856,- atau tercapai sebesar 99,97%. Output sub kegiatan ini adanya hasil penilaian SKP DP3/kinerja ASN sebanyak 1 dari target 1 dokumen.
15. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 19.160.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.160.500,- sisa sebesar Rp. 940.000,- atau tercapai sebesar 97,79%. Output sub kegiatan ini tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan yang dibelanjakan sebanyak 14 unit.
16. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp 42.521.100 dan terealisasi sebesar Rp. 41.581.100 sisa sebesar Rp. 3.685.320 atau tercapai sebesar 97,32%. Output sub kegiatan ini tersedianya alat-alat penunjang kegiatan kantor (komputer, printer, laptop, mesin penghancur kertas, dll) sebanyak 28 unit dari target 124 unit.
17. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp 38.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 38.000.000,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%. Output sub kegiatan ini adanya ketersediaan makan minum untuk tamu dan rapat sebanyak 144 kali dari target 144 kali.
18. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan sebesar Rp 42.967.000 dan terealisasi sebesar Rp. 42.967.000 sisa

- sebesar Rp. 0 atau tercapai sebesar 100,00%. Output sub kegiatan ini tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang dikerjakan dan dibayarkan sebanyak 9 dari target 9 jenis.
19. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material sebesar Rp 23.999.400,- dan terealisasi sebesar Rp 23.999.400,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%. Output sub kegiatan ini tersedianya Jumlah alat tulis kantor yang dibelanjakan sebanyak 51 jenis ATK dari target 51 jenis ATK.
 20. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp 74.112.000,- dan terealisasi sebesar Rp 74.112.000,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%. Output sub kegiatan ini tersedianya bahan bacaan kantor dan perundang-undangan sebanyak 60 media dari target 60 media.
 21. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp 118.572.500,- dan terealisasi sebesar Rp 118.520.930 sisa sebesar Rp. 51.570,- atau tercapai sebesar 99,96%. Output sub kegiatan ini orang yang melakukan perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebanyak 324 orang dari target 1.213 orang.
 22. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp 190.469.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 163.000.000,- tercapai sebesar 85,58% dan sisa sebesar Rp. 27.469.600,- yang merupakan selisih dari nilai harga kendaraan operasional lapangan roda 4 (empat) mobil Pik Up dibanding alokasi pagu anggaran yg ditetapkan dalam DPA. Output sub kegiatan ini tersedianya kendaraan dinas operasional roda 4 sebanyak 1 unit.
 23. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel sebesar Rp 34.999.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.541.300,- sisa sebesar Rp.23.458.000,- atau tercapai sebesar 32,98%. Output sub kegiatan ini tersedianya mebeleir kantor sebanyak 1 unit meja kerja.
 24. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp 20.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 20.000.000 sisa sebesar Rp. 0 atau tercapai sebesar 100,00%. Output sub kegiatan ini tersedianya peralatan dan mesin kantor sebanyak 1 unit Genset.
 25. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp 444.558.750,- dan terealisasi sebesar Rp.372.965.826,- atau tercapai sebesar 83,90%. Sisa sebesar Rp. 71.592.924,- yang merupakan pengurangan dari tagihan rekening listrik Labkesda. Output sub kegiatan

- ini jumlah rekening tagihan komunikasi,air dan listrik yang dibayarkan sebanyak 19 rekening.
26. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp 25.010.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.010.000,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100,00%. Output sub kegiatan ini jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang dikerjakan sebanyak 65 kali dari target 311 kali.
 27. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp 92.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 86.000.000,- sisa sebesar Rp. 6.000.000,- atau tercapai sebesar 93,443%. Output sub kegiatan ini jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan yang dibayarkan sebanyak 38 unit dari target 311 kali.
 28. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp 59.008.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 56.167.200,- sisa sebesar Rp.2.841.300,- atau tercapai sebesar 95,18%. Output sub kegiatan jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dikerjakan sebanyak 57 unit
 29. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya sebesar Rp 545.767.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 543.352.306,- sisa sebesar Rp. 2.415.394,- atau tercapai sebesar 99,56%. Output sub kegiatan ini jumlah pemeliharaan gedung/kantor yang rutin dilaksanakan sebanyak 79 jenis.
 30. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas) sebesar Rp. 180.959.391.637- dengan realisasi sebesar Rp. 107.131.342.000 sisa sebesar sebesar Rp. 73.828.049.637,- atau tercapai sebesar 59,20%.

Pencapaian Sasaran 5 : Meningkatnya Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Capaian 2021	2022					Target Akhir Renstra
	Uraian	Indikator Kinerja Outcome			Target	Sasaran	Hasil	Capaian	Persentase Capaian	
1	Meningkatnya Tempat Pengelolaan Pangan yang memenuhi syarat kesehatan	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan memenuhi syarat kesehatan	Persen	63,58	64	949	816	85,99	134,35	70

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 64%. Capaian Persentase Tempat Pengelolaan Pangan memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2022 sebesar 85,99, dengan rincian sebanyak 816 tempat pengelolaan pangan yang memenuhi syarat dari total 949 tempat pengelolaan pangan yang ada. Dengan demikian rasio persentase capaian terhadap target indikator sasaran tersebut sebesar 134,35% dengan kategori sangat baik.

Apabila kita membandingkan capaian persentase Tempat Pengelolaan Pangan memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2022 sebesar 85,99 terhadap tahun 2021 (63,58%), maka ada peningkatan capaian sebesar 22,41%.

Target persentase Tempat Pengelolaan Pangan memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2022 sebesar 64% telah disinkronkan dengan target akhir Renstra Perubahan Dinas Kesehatan pada periode Tahun 2019-2024 sebesar 70%. Bila dilihat dari hasil capaian persentase Tempat Pengelolaan Pangan memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2022 maka capaian tersebut sudah diatas target akhir tahun Renstra.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan capaian TPP yang memenuhi syarat diantaranya :

1. Dilakukan pembinaan petugas Sanitarian Puskesmas untuk melakukan pendataan TPP dan entry data ke aplikasi eMonev HSP.
2. Dilakukan pembinaan atau Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) TPP setelah terdaftar di DPMPSTSP dibuktikan dengan adanya NIB (Nomor Induk Berusaha) dari www.oss.go.id
3. Puskesmas dan petugas Dinas Kesehatan melakukan monitoring dan pembinaan kondisi Kesehatan lingkungan di lokasi TPP, harus memenuhi persyaratan Kesehatan.

4. Pembinaan ke tempat produksi pangan (IRTP), harus sesuai dengan standar BPOM untuk memperoleh sertifikat pangan produk rumah tangga.
5. Dinas Kesehatan bersama Puskesmas melakukan pembinaan dan penyuluhan keamanan pangan (PKP).

Adapun Program yang mendukung capaian sasaran 5 adalah Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, yang memiliki 3 Sub Kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dengan alokasi anggaran sebesar Rp 49.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.999.900,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100,00%. Dengan output sub kegiatan ini jumlah sarana kesehatan yang mendapat rekomendasi sebanyak 50 sarana kesehatan, dan yang mendapat pembinaan sebanyak 50 sarana.
2. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%. Dengan output sub kegiatan ini jumlah SPP-IRT yang dikeluarkan sebanyak 603 sertifikat dari target 70 sertifikat.
3. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM), dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%. Dengan output sub kegiatan ini TPM yang memiliki sertifikat laik sehat/laik higiene Sanitasi sebanyak 28 dari target 170 sertifikat.

Pencapaian Sasaran 6 : Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Capaian 2021	2022					Target Akhir Renstra
	Uraian	Indikator Kinerja Outcome			Target	Sasaran	Hasil	Capaian	Rasio Persentase	
1	Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	35,0	16,70	60	35	58,33	349,30	26,70

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 16,70%. Capaian Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 sebesar 58,33%, dengan rincian sebanyak 35 Puskesmas dengan jenis tenaga yang memenuhi standar dari total 60 Puskesmas yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan demikian rasio persentase capaian dibandingkan target sasaran tersebut sebesar 349,30% dengan kategori sangat baik.

Apabila kita membandingkan Capaian Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 sebesar 58,33% terhadap tahun 2021 (35,0%), maka ada peningkatan capaian sebesar 23,33%.

Target Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar pada Tahun 2022 sebesar 16,70% telah disinkronkan dengan target akhir Renstra Perubahan Dinas Kesehatan pada periode Tahun 2019-2024 sebesar 26,70%. Bila dilihat dari hasil Capaian Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar pada Tahun 2022 maka capaian tersebut sudah diatas target akhir tahun Renstra.

Dari 60 Puskesmas , 35 Puskesmas yang memiliki jenis tenaga sesuai standar (58,33%). Faktor yang mendukung keberhasilan antara lain Pemerintah Daerah memenuhi formasi untuk CPNS atau P3K sesuai dengan kebutuhan tenaga kesehatan. Dan yang menjadi faktor yang menghambat adalah Formasi CPNS dan P3K belum memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Tindak lanjutnya adalah Puskesmas mendayagunakan tenaga kesehatan yang dibutuhkan dengan memanfaatkan dana Jasa Pelayanan dari BPJS

Adapun Program yang mendukung capaian sasaran 6 adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang memiliki 5 Sub Kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 44.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 44.705.610,- sisa sebesar Rp. 294.290,- atau tercapai sebesar 99,35%. Dengan output sub kegiatan ini Jumlah SIP yang diterbitkan sebanyak 2.707 SIP dari target 1700 SIP.
2. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 34.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.999.900,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100,00%. Dengan output sub kegiatan ini tenaga kesehatan yang menjalankan praktek sesuai dengan standar sebanyak 176 nakes dari target 60 nakes.

3. Sub Kegiatan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 44.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 44.999.900,- sisa sebesar Rp 0,- atau tercapai sebesar 100,00%. Dengan output sub kegiatan ini tersedianya data SDM di 60 Puskesmas dan Labkesda sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen.
4. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 34.999.800,- dan terealisasi sebesar Rp 34.999.800,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100,00%. Dengan output sub kegiatan ini jumlah Nakes yang dinilai kinerja dengan pencapaian angka kredit dan uji kompetensi sebanyak 494 nakes dari target 170 nakes.
5. Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 39.999.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.499.800,- sisa sebesar Rp 500.000,- atau tercapai sebesar 98,75%. Dengan output sub kegiatan ini sebanyak 604 Nakes yang dilatih untuk peningkatan kapasitas SDM di target 250 nakes.

Pencapaian Sasaran 7 : Persentase capaian standar pelayanan minimal RS

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Capaian 2021	2022					Target Akhir Renstra
	Uraian	Indikator Kinerja Outcome			Target	Sasaran	Hasil	Capaian	Persentase	
1	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Persentase capaian standar pelayanan minimal RS di RSUD Arjawinangun	%	101,62	88,00	88,00	93,25	105,97	105,97	100,0
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Persentase capaian standar pelayanan minimal RS di RSUD Waled	%	105,77	88,00	88,00	89,24	101,41	101,41	100,0

RSUD Arjawinangun

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 88,00%, dengan hasil 93,25% sehingga persentase capaian standar pelayanan minimal RS di RSUD Arjawinangun pada tahun 2022 sebesar 105,97% dengan kategori sangat baik. Terjadi peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2021, dari target 80% tercapai hasil 81,30%.

Apabila kita membandingkan Persentase capaian standar pelayanan minimal RS di RSUD Arjawinangun pada tahun 2022 sebesar 105,97% terhadap tahun 2021 (101,62%), maka ada peningkatan capaian sebesar 4,34%.

Target Capaian Persentase capaian standar pelayanan minimal RS di RSUD Arjawinangun pada tahun 2022 sebesar 88,00% telah disinkronkan dengan target akhir Renstra Perubahan Dinas Kesehatan pada periode Tahun 2019-2024 sebesar 100%. Bila dilihat dari hasil capaian standar pelayanan minimal RS di RSUD Arjawinangun pada Tahun 2022 maka hasil capaiannya masih dibawah target akhir tahun Renstra.

Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di RSUD Arjawinangun pada tahun 2022 sebesar 93,25%. Secara umum capaian SPM di RSUD berdasarkan 21 jenis pelayanan berada pada angka 90%. Untuk menilai capaian SPM pada RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon yaitu dengan membandingkan antara capaian dengan target. Target SPM yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/III/2010 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal diturunkan lagi targetnya menjadi target RSUD yang tertuang di dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahunan RSUD Arjawinangun

Beberapa faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian indikator SPM di RS Arjawinangun adalah sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Minimal merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan RSUD Arjawinangun sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara layanan di RSUD Arjawinangun.
2. Pihak manajemen dan unit/instalasi/bidang/bagian di RSUD Arjawinangun selalu mengedepankan komunikasi dan koordinasi serta standar operasional pelayanan (SOP) menjadi pedoman penyelenggara pelayanan di RSUD Arjawinangun.

RSUD Waled

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 88,00%, dengan hasil 89,24% sehingga persentase capaian standar pelayanan minimal RS di RSUD Waled pada tahun 2022 sebesar 101,41% dengan kategori sangat baik. Terjadi peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2021, dari target 80% tercapai hasil 84,62%.

Apabila kita membandingkan Persentase capaian standar pelayanan minimal RS di RSUD Waled pada tahun 2022 sebesar 101,41% terhadap tahun 2021 (105,77%), maka ada penurunan capaian sebesar 4,36%.

Target Capaian Persentase capaian standar pelayanan minimal RS di RSUD Waled pada tahun 2022 sebesar 88,00% telah disinkronkan dengan target akhir Renstra Perubahan Dinas Kesehatan pada periode Tahun 2019-2024 sebesar 100%. Bila dilihat dari hasil capaian standar pelayanan minimal RS di RSUD Waled pada Tahun 2022 maka hasil capaiannya masih dibawah target akhir tahun Renstra.

Realisasi Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di RSUD Waled 101,41%. Faktor penghambatnya adalah ketersediaan sarana prasarana yang belum mencukupi dan sesuai standar pelayanan dan belum optimalnya kesadaran sumber daya manusia di dalam upaya pencapaian target standar pelayanan minimal. Faktor Pendorong keberhasilannya yaitu terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian target standar pelayanan minimal serta tingginya perhatian manajemen terhadap upaya-upaya pencapaian target standar pelayanan minimal.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan adalah identifikasi kebutuhan sarana prasarana yang mendukung pencapaian standar pelayanan minimal, optimalisasi sarana prasarana yang ada untuk mendukung tercapainya standar pelayanan minimal dan monitoring dan evaluasi capaian target standar pelayanan secara berkala (6 bulan sekali).

Adapun Program yang mendukung capaian sasaran 7 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang memiliki 1 Sub Kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.707.999.400 dan terealisasi sebesar Rp. 2.286.522.571 sisa sebesar Rp. 421.476.829 atau tercapai sebesar 84,44% Dengan output sub kegiatan adalah pegawai TKD WKDS RSUD Waled yang terbayarkan gajinya sebanyak 58 orang dari target 67 orang dan pegawai kontrak daerah RSUD Arjawinangun yang terbayarkan gajinya sebanyak 59 orang dari target 60 orang.
2. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
 - a. RSUD Arjawinangun sebesar Rp. 159.747.983.000,- realisasi sebesar Rp.135.102.741.000 sisa sebesar sebesar Rp. 24.645.242.000,- atau tercapai sebesar 84,57%. Output sub kegiatan ini jumlah pasien yang ditangani sebanyak 119.545 (RSUD Arjawinangun).

- b. RSUD Waled sebesar Rp. 162.855.495.674,- realisasi sebesar Rp. 148.986.832.439,- sisa sebesar sebesar Rp. 13.868.663.235,- atau tercapai sebesar 91,48%. Output sub kegiatan ini jumlah pasien yang ditangani sebanyak 98.375 (RSUD Waled).

Dalam mencapai target indikator tujuan dan sasaran pada Tahun 2022, Dinas Kesehatan menghadapi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas, capaian saat ini dari 60 Puskesmas baru 56,67% Puskesmas yang lengkap 9 jenis tenaga kesehatannya, tetapi ini juga sebagian besar dipenuhi dengan tenaga kesehatan non ASN.
2. Adanya keterlambatan riviui dari Inspektorat membuat kegiatan insentif UKM yang ada pada menu BOK Puskesmas tidak disetujui oleh Kemenkes, dan berdampak pada realisasi anggaran kegiatan BOK Puskesmas yang ada pada sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas rendah (76,44%).
3. Adanya pe-nonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS-Kesehatan dengan alasan peserta tidak ditanggung iuran kepesertaannya.
4. Penambahan peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS-Kesehatan lebih sedikit dibandingkan dengan penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon.
5. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat masih belum mencapai target yang diharapkan, hal itu disebabkan salah satunya karena adanya kenaikan tarif retribusi pelayanan Puskesmas. Puskesmas mulai menerapkan BLUD tahun 2022, sehingga terjadi perubahan tarif retribusi pelayanan di Puskesmas menjadi tarif pelayanan BLUD. Kenaikan tarif memang harus disesuaikan karena retribusi sebelumnya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon yang sudah 10 tahun tidak dilakukan penyesuaian tarif dengan harga-harga barang/jasa untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas.
6. Manajemen penyelenggaraan pelayanan publik baik di Puskesmas, Labkesda maupun Dinas Kesehatan belum optimal.
7. Sarana dan prasarana pelayanan publik di lingkup kesehatan masih terbatas, (tempat parkir, ruang tunggu, informasi, dll).

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kesehatan telah melakukan solusi-solusi sebagai berikut:

1. Membuat rencana kebutuhan sumber daya manusia kesehatan berdasarkan jenis, jumlah, dan lokus tenaga disesuaikan dengan beban kerja Puskesmas, Labkesda dan Dinas Kesehatan.
2. Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan BOK Puskesmas agar pemanfaatan dana lebih optimal.
3. Advokasi, koordinasi dan kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait serta Pemerintah Daerah untuk menyusun dan merumuskan kebijakan tentang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional/ BPJS yang menjadi tanggungjawab di Kabupaten Cirebon (PBI Daerah).
4. Dilakukan pemadanan terkait perubahan data penduduk meliputi: 1) kelahiran dan kematian penduduk; 2) penduduk yang pindah keluar Kabupaten Cirebon; 3) penduduk yang datang ke Kabupaten Cirebon dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.
5. Melakukan sosialisasi tentang penerapan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 157 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
6. Melakukan monitoring dan pembinaan ke Puskesmas agar meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas.
7. Melakukan pembinaan kepada pegawai di lingkup Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Labkesda tentang Budaya Kerja (core value BERAKHLAK).

C. INFORMASI KEUANGAN TERKAIT PENCAPAIAN SASARAN

Pada tahun Anggaran 2022, Dinas Kesehatan mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp. 1.071.752.680.329,- dengan realisasi sejumlah Rp. 924.570.452.650,- atau 86,27%. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp. 147.182.227.679,-. Berikut adalah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2022:

1. Urusan yang melekat pada perangkat daerah pada Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 9 (sembilan) Kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.740.073.271.736,- dengan capaian realisasi sebesar Rp.620.053.238.549,- dan sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp.120.020.033.187,- (16,22%) atau tercapai sebesar 83,78%.
2. Urusan Kesehatan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan pada Tahun Anggaran 2022 didukung melalui Empat (4) Program, dengan Tiga Belas (13) Kegiatan, dan Lima Puluh Enam (56) Sub Kegiatan dengan ditunjang anggaran sebesar Rp. 331.679.408.593,- dan terealisasi sebesar

Rp. 304.517.213.421,- sisa sebesar Rp. 27.162.195.172,- atau tercapai sebesar 91,81%.

Capaian Kinerja dan Capaian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM
URUSAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan			sisa
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu	Realisasi	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	30	30,16	100,54				
1	Menurunnya Angka kematian ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	82	67,03	183,16	139.042.143.183	113.196.220.300	81,41	25.845.922.883
2	Tercapainya <i>Universal Health Coverage (UHC)</i>	Persentase UHC	98	95,99	97,95	188.602.415.410	187.815.245.530	99,58	787.169.880
3	Meningkatnya PHBS Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga berPHBS	71	71,07	100,11	562.851.400	558.468.110	99,22	4.383.290
4	Meningkatnya Tempat Pengelolaan Pangan yang memenuhi syarat kesehatan	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan memenuhi syarat Kesehatan	64	85,99	134,35	79.999.900	79.999.900	100,00	-
5	Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	16,7	58,33	349,30	199.999.300	199.205.010	99,60	794.290

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan			sisa
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu	Realisasi	Persentase	
6	Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas manajemen dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,389	98,23	98,23	417.355.390.262	335.958.292.414	80,50	81.397.098.528
7	Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit	Persentase capaian standar pelayanan minimal di RSUD Arjawinangun	88	105,97	105,97	161.605.560.200	136.632.927.662	84,55	24.972.632.539
		Persentase capaian standar pelayanan minimal di RSUD Waled	88	101,41	101,41	164.304.320.674	150.130.093.725	91,37	14.174.226.950
						1.071.752.680.329	924.570.452.650	86,27	147.182.227.679

Ada 5 (lima) Program yang menunjang tujuan dan semua sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang dibiayai dari dari APBD Kabupaten Tahun 2022 sebesar Rp 740.073.271.736,00 dengan realisasi Rp. 620.053.238.549,00 (83,78%), anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 120.020.033.187,00 Program ini didukung dengan 9 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan. Pada sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan ada dana tersisa yang merupakan selisih dari nilai harga kendaraan oprasional dan pagu DPA nya, sub kegiatan pengadaan mebel ada pengembalian belanja modal alat penunjang kantor (meja kerja), sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD pada belanja sewa tanah untuk bangunan tempat kerja tidak semua pemerintah desa mengajukan biaya sewa tanah Puskesmas dari 53 Pusk yang terealisasi hanya untuk 40 Pusk, sehingga ada pengembalian biaya sewa tanah yang telah dianggarkan pada saat perencanaan, pada sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, khususnya pada BLUD Puskesmas masih banyak anggaran tersisa karena masih banyak Puskesmas yang merubah belanja pada RBA BLUD/kurang cermat dalam merubah RBA sehingga ketika realisasi tidak bisa dibayarkan, hal itu berdampak pada realisasi belanja pada sub kegiatan itu.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang dibiayai dari dari APBD Kabupaten Tahun 2022 dan APBN (Dana DAK) sebesar Rp 330.836.557.993,00 dengan realisasi Rp. 303.679.540.401,00 (91,79%), yang didukung dengan 4 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan. Pada program ini ada efisiensi anggaran dan anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 27.157.017.592,00, yaitu pada sub kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas yang merupakan kegiatan bersumber dari DAK (BOK Puskesmas) ada kegiatan pemberian insentif UKM yang tidak dapat dilaksanakan, Sub kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah, ada anggaran untuk perawatan kasus KIPI yang tidak digunakan karena tidak ada kasus KIPI, belanja Alat pelindung diri (APD) yang banyak tersisa karena hanga APD yang menurun dibandingkan rencana anggaran dan adanya sumber dana lain untuk pembelian APD, dan sedikitnya pelaksanaan vaksinasi massal membuat penyerapan belanja makan untuk panitia dan peserta vaksinasi tidak terealisasi. Pada Sub kegiatan pengelolaan gizi masyarakat, ada selisih nilai kontrak pengadaan barang dan pengadaan jasa (sewa tempat pertemuan),

- adanya perubahan harga pada alat antropometri, dan beberapa kegiatan yang dilakukan secara daring. Pada Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dana yang masih tersisa pada rekening perjadi dalam kota yang tidak dilaksanakan. Pada sub kegiatan pengadaan Obat, masih ada dana tersisa yang merupakan efisiensi dari lelang yang tidak dibelanjakan.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang dibiayai dari dari APBD Kabupaten Tahun 2022 sebesar Rp 199.999.300,00 dengan realisasi Rp. 199.205.010,00 (99,60%) yang didukung dengan 3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan. Pada program ini ada efisiensi anggaran dan anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 794.290,00,-.
 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, yang dibiayai dari dari APBD Kabupaten Tahun 2022 sebesar Rp 79.999.900,00 dengan realisasi Rp. 79.999.900,00 (100,00%) yang didukung dengan 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan. Pada program ini tidak ada anggaran yang tersisa.
 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yang dibiayai dari dari APBD Kabupaten Tahun 2022 dan APBN (Dana DAK) sebesar Rp 562.851.400,00 dengan realisasi Rp. 558.468.110 (99,22%) yang didukung dengan 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan. Pada program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 4.383.290,00,- yang berasal dari efisiensi kegiatan publikasi (pembuatan video tentang Kesehatan).

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2022 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada umumnya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatannya.

Berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon selama Tahun 2022, sehingga beberapa program/ kegiatan/sub kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon perlu melakukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi tahun 2022.

Kendala atau permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas, capaian saat ini dari 60 Puskesmas baru 56,67% Puskesmas yang lengkap 9 jenis tenaga kesehatannya, tetapi ini juga sebagian besar dipenuhi dengan tenaga kesehatan non ASN.
2. Adanya keterlambatan riviui dari Inspektorat membuat kegiatan insentif UKM yang ada pada menu BOK Puskesmas tidak disetujui oleh Kemenkes, dan berdampak pada realisasi anggaran kegiatan BOK Puskesmas yang ada pada sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas rendah (76,44%).
3. Adanya pe-nonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS-Kesehatan dengan alasan peserta tidak ditanggung iuran kepesertaannya.
4. Penambahan peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS-Kesehatan lebih sedikit dibandingkan dengan penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon.

5. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat masih belum mencapai target yang diharapkan, hal itu disebabkan salah satunya karena adanya kenaikan tarif retribusi pelayanan Puskesmas. Puskesmas mulai menerapkan BLUD tahun 2022, sehingga terjadi perubahan tarif retribusi pelayanan di Puskesmas menjadi tarif pelayanan BLUD. Kenaikan tarif memang harus disesuaikan karena retribusi sebelumnya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon yang sudah 10 tahun tidak dilakukan penyesuaian tarif dengan harga-harga barang/jasa untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas.
6. Manajemen penyelenggaraan pelayanan publik baik di Puskesmas, Labkesda maupun Dinas Kesehatan belum optimal.
7. Sarana dan prasarana pelayanan publik di lingkup kesehatan masih terbatas, (tempat parkir, ruang tunggu, informasi, dll).

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kesehatan telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Membuat rencana kebutuhan sumber daya manusia kesehatan berdasarkan jenis, jumlah, dan lokus tenaga disesuaikan dengan beban kerja Puskesmas, Labkesda dan Dinas Kesehatan.
2. Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan BOK Puskesmas agar pemanfaatan dana lebih optimal.
3. Advokasi, koordinasi dan kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait serta Pemerintah Daerah untuk menyusun dan merumuskan kebijakan tentang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional/ BPJS yang menjadi tanggungjawab di Kabupaten Cirebon (PBI Daerah).
4. Dilakukan pemadanan terkait perubahan data penduduk meliputi: 1) kelahiran dan kematian penduduk; 2) penduduk yang pindah keluar Kabupaten Cirebon; 3) penduduk yang datang ke Kabupaten Cirebon dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.
5. Melakukan sosialisasi tentang penerapan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 157 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
6. Melakukan monitoring dan pembinaan ke Puskesmas agar meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas.
7. Melakukan pembinaan kepada pegawai di lingkup Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Labkesda tentang Budaya Kerja (core value BERAKHLAK).

